



WALIKOTA LANGSA  
PROPINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBK Langsa Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  26. Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023;
  27. Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ...

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.842.766.463.946,- bertambah sebesar Rp.60.536.908.880,- sehingga menjadi sebesar Rp.903.303.372.826,-

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp. 825.798.409.427,-
  - b. Bertambah Rp. 39.337.349.138,-Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 865.135.758.565,-
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp. 842.766.463.946.-
  - b. Bertambah Rp. 60.536.908.880,-Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 903.303.372.826,-
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1) Semula Rp. 17.468.054.519,-
    - 2) Bertambah Rp. 21.199.559.742,-Jumlah Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 38.667.614.261,-
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
    - 1) Semula Rp. 500.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 0,-Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 500.000.000,-Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 38.167.614.261,-

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
  - 1) Semula Rp. 148.049.743.069,-
  - 2) Bertambah. Rp. 17.389.761.854,-Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 165.439.504.923,-
- b. Pendapatan Transfer
  - 1) Semula Rp. 677.748.666.358,-
  - 2) Bertambah Rp. 21.947.587.284,-Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 699.696.253.642,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
- a. Pajak daerah
    - 1) Semula Rp. 21.015.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 635.638.093,-
    - Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 21.650.638.093,-
  - b. Retribusi daerah
    - 1) Semula Rp. 4.738.823.000,-
    - 2) Berkurang Rp. 291.273.766,-
    - Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 4.447.549.234,-
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
    - 1) Semula Rp. 1.290.000.000,-
    - 2) Berkurang Rp. 341.890.924,-
    - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 948.109.076,-
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
    - 1) Semula Rp. 121.005.920.069,-
    - 2) Bertambah Rp. 17.387.288.451,-
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah setelah perubaha Rp. 138.393.208.520,-
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Hotel
    - 1) Semula Rp. 500.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 100.000.000,-
    - Jumlah Pajak Hotel setelah perubahan Rp. 600.000.000,-
  - b. Pajak Restoran
    - 1) Semula Rp. 1.500.000.000,-
    - 2) Berkurang Rp. 200.000.000,-
    - Jumlah Pajak Restoran setelah perubahan Rp. 1.300.000.000,-
  - c. Pajak Hiburan
    - 1) Semula Rp. 35.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 13.000.000,-
    - Jumlah Pajak Hiburan setelah perubahan Rp. 48.000.000,-
  - d. Pajak Reklame
    - 1) Semula Rp. 750.000.000,-
    - 2) Berkurang Rp. 350.000.000,-
    - Jumlah Pajak reklame setelah perubahan Rp. 400.000.000,-
  - e. Pajak Penerangan Jalan
    - 1) Semula Rp. 9.480.000.000,-
    - 2) Berkurang Rp. 321.536.907,-
    - Jumlah Pajak Penerangan setelah perubahan Rp. 9.158.463.093,-
  - f. Pajak Parkir
    - 1) Semula Rp. 50.000.000,-
    - 2) Bertambah Rp. 20.000.000,-
    - Jumlah Pajak Parkir setelah perubahan Rp. 70.000.000,-
  - g. Pajak Air Tanah
    - 1) Semula Rp. 100.000.000,-

2) Berkurang ...

- |   |     |                      |                     |
|---|-----|----------------------|---------------------|
| 2) Berkurang  | Rp. | <u>28.000.000,-</u>  |                     |
| Jumlah Pajak Air Tanah setelah perubahan  |     |                      | Rp. 72.000.000,-    |
| h. Pajak Sarang Burung Walet  |     |                      |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 50.000.000,-         |                     |
| 2) Berkurang  | Rp. | <u>22.825.000,-</u>  |                     |
| Jumlah Pajak Sarang Burung Walet setelah perubahan  |     |                      | Rp. 27.175.000,-    |
| i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan   |     |                      |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 760.000.000,-        |                     |
| 2) Berkurang  | Rp. | <u>185.000.000,-</u> |                     |
| Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setelah perubahan   |     |                      | Rp. 575.000.000,-   |
| j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)  |     |                      |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 3.790.000.000,-      |                     |
| 2) Bertambah  | Rp. | <u>910.000.000,-</u> |                     |
| Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) setelah perubahan  |     |                      | Rp. 4.700.000.000,- |
| k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  |     |                      |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 4.000.000.000,-      |                     |
| 2) Bertambah  | Rp. | <u>700.000.000,-</u> |                     |
| Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah setelah perubahan   |     |                      | Rp. 4.700.000.000,- |
| (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari:  |     |                      |                     |
| a. Retribusi Jasa Umum  |     |                      |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 2.607.600.000,-      |                     |
| 2) Bertambah  | Rp. | <u>50.000.000,-</u>  |                     |
| Jumlah Retribusi Jasa Umum setelah perubahan  |     |                      | Rp. 2.657.600.000,- |
| b. Retribusi Jasa Usaha   |     |                      |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 1.680.700.000,-      |                     |
| 2) Berkurang  | Rp. | <u>331.273.766,-</u> |                     |
| Jumlah Retribusi Jasa Usaha setelah Perubahan   |     |                      | Rp. 1.349.426.234,- |
| c. Retribusi Perizinan Tertentu   |     |                      |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 450.523.000,-        |                     |
| 2) Berkurang  | Rp. | <u>10.000.000,-</u>  |                     |
| Jumlah Retribusi Perizinan tertentu setelah Perubahan   |     |                      | Rp. 440.523.000,-   |
| (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yaitu: |     |                      |                     |
| a. Semula   | Rp. | 1.290.000.000,-      |                     |
| b. Berkurang  | Rp. | <u>341.890.924,-</u> |                     |
| Jumlah bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD setelah Perubahan  |     |                      | Rp. 948.109.076,-   |
| (5) Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bersumber dari:  |     |                      |                     |
| a. Jasa Giro  |     |                      |                     |
| 1) Semula   | Rp. | 800.000.000,-        |                     |
| 2) Berkurang  | Rp. | <u>600.000.000,-</u> |                     |
| Jumlah Jasa Giro setelah Perubahan  |     |                      | Rp. 200.000.000,-   |
| b. Pendapatan Bunga   |     |                      |                     |

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,-	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>1.350.000.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan Bunga setelah Perubahan			Rp. 150.000.000,-
c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>29.913.200,-</u>	
Jumlah Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah setelah perubahan			Rp. 29.913.200,-
d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.144.964.944,-</u>	
Jumlah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan setelah perubahan			Rp. 1.144.964.944,-
e. Pendapatan Denda Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>173.681.403,-</u>	
Jumlah Pendapatan Denda Pajak Daerah Setelah perubahan			Rp. 173.681.403,-
f. Pendapatan dari Pengembalian			
1) Semula	Rp.	600.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>271.845.475,-</u>	
Jumlah Pendapatan dari Pengembalian setelah perubahan			Rp. 871.845.475,-
g. Pendapatan BLUD			
1) Semula	Rp.	112.852.182.671,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>15.563.598.920,-</u>	
Jumlah Pendapatan BLUD setelah Perubahan			Rp. 128.415.781.591,-
h. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKPT)			
1) Semula	Rp.	1.228.737.398,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>139.042.309,-</u>	
Jumlah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKPT) setelah perubahan			Rp. 1.367.779.707,-
i. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>39.242.200,-</u>	
Jumlah Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah setelah perubahan			Rp. 39.242.200,-
j. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf			
1) Semula	Rp.	4.025.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.975.000.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf setelah Perubahan			Rp. 6.000.000.000,-

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula ...

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 620.822.143.000,-       |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 19.852.106.036,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan |                             |
|   | Rp. 640.674.249.036,-       |
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 56.926.523.358,-       |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 2.095.481.248,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan |                            |
|   | Rp. 59.022.004.606,-       |
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
- a. Dana Perimbangan
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 564.276.403.000,-      |
| 2) Berkurang                              | <u>Rp. 1.597.711.036,-</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan |                            |
|   | Rp. 565.874.114.036,-      |
- b. Dana Insentif Daerah (DID)
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 0,-                     |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 16.299.407.000,-</u> |
| Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) Setelah Perubahan |                             |
|   | Rp. 16.299.407.000,-        |
- c. Dana Desa
- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                          | Rp. 56.545.740.000,-       |
| 2) Bertambah                       | <u>Rp. 1.954.988.000,-</u> |
| Jumlah Dana Desa setelah perubahan |                            |
|                                    | Rp. 58.500.728.000,-       |
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
- a. Pendapatan Bagi Hasil
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 27.123.797.394,-       |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp. 3.653.498.555,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Bagi Hasil setelah perubahan |                            |
|  | Rp. 30.777.295.949,-       |
- b. Bantuan Keuangan
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 29.802.725.964,-       |
| 2) Berkurang                              | <u>Rp. 1.558.017.307,-</u> |
| Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan |                            |
|   | Rp. 28.244.708.657,-       |

#### Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 675.090.443.798,-       |
| 2) Bertambah                                 | <u>Rp. 58.399.608.563,-</u> |
| Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan |                             |
|  | Rp. 733.490.052.361,-       |
- b. Belanja Modal
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 62.996.571.148,-       |
| 2) Berkurang                           | <u>Rp. 1.169.940.154,-</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan |                            |
|  | Rp. 64.166.511.302,-       |
- c. Belanja tidak terduga
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 2.000.000.000,-        |
| 2) Berkurang                                   | <u>Rp. 1.263.203.960,-</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan |                            |
|  | Rp. 736.796.040,-          |

d. Belanja ...



d. Belanja Transfer		
1) Semula	Rp. 102.679.449.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 2.230.564.123,-</u>	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan		Rp. 104.910.013.123,-

Pasal 7

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, terdiri atas:
- a) Belanja Pegawai
- |  |                            |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 328.572.421.831,-      |                       |
| 2) Berkurang                             | <u>Rp. 7.675.122.563,-</u> |                       |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan |                            | Rp. 320.897.299.268,- |
- b) Belanja Barang dan Jasa
- |  |                             |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 282.259.825.611,-       |                       |
| 2) Bertambah                                     | <u>Rp. 38.435.465.303,-</u> |                       |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan |                             | Rp. 320.695.290.914,- |
- c) Belanja Subsidi
- |  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 975.330.000,-       |                   |
| 2) Berkurang                             | <u>Rp. 80.000.000,-</u> |                   |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan |                         | Rp. 895.330.000,- |
- d) Belanja Hibah
- |  |                             |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 33.219.590.702,-        |                      |
| 2) Bertambah                           | <u>Rp. 16.501.973.243,-</u> |                      |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan |                             | Rp. 49.721.563.945,- |
- e) Belanja Bantuan Sosial
- |   |                             |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 30.063.275.654,-        |                      |
| 2) Bertambah                                    | <u>Rp. 11.217.292.580,-</u> |                      |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan |                             | Rp. 41.280.568.234,- |
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Belanja dan Tunjangan Gaji ASN;
- |   |                            |                       |
|---|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 236.297.172.495,-      |                       |
| 2) Berkurang  | <u>Rp. 5.661.286.930,-</u> |                       |
| Jumlah Belanja dan Tunjangan Gaji ASN setelah perubahan |                            | Rp. 230.635.885.565,- |
- b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
- |   |                            |                      |
|---|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 50.221.633.871,-       |                      |
| 2) Berkurang                                      | <u>Rp. 2.233.347.113,-</u> |                      |
| Jumlah Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan |                            | Rp. 47.988.286.758,- |
- c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- |   |                          |                      |
|---|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 33.371.179.150,-     |                      |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 166.298.480,-</u> |                      |
| Jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN setelah perubahan |                          | Rp. 33.537.477.630,- |
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK;
- |  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| 1) Semula                              | Rp. 8.161.356.315,-      |  |
| 2) Berkurang                           | <u>Rp. 146.787.000,-</u> |  |
| Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRK |                          |  |

setelah ...

- setelah perubahan Rp. 8.014.569.315,-
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;  
 1) Semula Rp. 10.200.000,-  
 2) Bertambah Rp. 0,-  
 Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan Rp. 10.200.000,-
- f. Belanja Penerima Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH;  
 1) Semula Rp. 510.880.000,-  
 2) Bertambah Rp. 200.000.000,-  
 Jumlah Belanja Penerima Lainnya Pimpinan DPRK serta KDH/WKDH setelah perubahan Rp. 710.880.000,-
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Barang  
 1) Semula Rp. 43.480.418.249,-  
 2) Bertambah Rp. 10.640.800.261,-  
 Jumlah Belanja Barang setelah perubahan Rp. 54.121.218.510,-
- b. Belanja Jasa  
 1) Semula Rp. 80.788.495.020,-  
 2) Berkurang Rp. 979.487.457,-  
 Jumlah Belanja Jasa setelah perubahan Rp. 79.809.007.563,-
- c. Belanja Pemeliharaan  
 1) Semula Rp. 4.321.788.695,-  
 2) Bertambah Rp. 1.029.482.571,-  
 Jumlah Belanja Pemeliharaan setelah perubahan Rp. 5.351.271.266,-
- d. Belanja Perjalanan Dinas;  
 1) Semula Rp. 19.658.758.976,-  
 2) Bertambah Rp. 4.912.617.605,-  
 Jumlah Belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan Rp. 24.571.376.581,-
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;  
 1) Semula Rp. 9.455.400.000,-  
 2) Berkurang Rp. 9.750.000,-  
 Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat setelah perubahan Rp. 9.445.650.000,-
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS:  
 1) Semula Rp. 17.388.920.000,-  
 2) Berkurang Rp. 2.149.782.416,-  
 Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS setelah perubahan Rp. 15.239.137.584,-
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.  
 1) Semula Rp. 107.166.044.671,-  
 2) Bertambah Rp. 24.991.584.739,-  
 Jumlah Belanja Barang dan Jasa BLUD setelah perubahan Rp. 132.157.629.410,-
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Belanja Subsidi kepada BUMN  
 1) Semula Rp. 676.930.000,-  
 2) Bertambah Rp. 0,-  
 Jumlah Belanja Subsidi kepada BUMN setelah perubahan Rp. 676.930.000,-

b. Belanja ...

- b. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
- |              |            |                     |
|--------------|------------|---------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 298.400.000,-       |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>80.000.000,-</u> |
- Jumlah Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta setelah perubahan Rp. 218.400.000,-
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- |              |            |                         |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 32.444.120.684,-        |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>13.753.673.243,-</u> |
- Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia setelah perubahan Rp. 46.197.793.927,-
- b. Belanja Hibah Dana Bos
- |              |            |                        |
|--------------|------------|------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 0,-                    |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>2.748.300.000,-</u> |
- Jumlah Belanja Hibah Dana Bos setelah Perubahan Rp. 2.748.300.000,-
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- |              |            |               |
|--------------|------------|---------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 775.470.018,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u>    |
- Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik setelah perubahan Rp. 775.470.018,-
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- |              |            |                        |
|--------------|------------|------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 20.050.328.452,-       |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>2.749.166.619,-</u> |
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial kepada Individu setelah perubahan Rp. 22.799.495.071,-
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- |              |            |                        |
|--------------|------------|------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 9.582.747.202,-        |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>8.468.125.961,-</u> |
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat setelah perubahan Rp. 18.050.873.163,-
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga, Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- |              |            |               |
|--------------|------------|---------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 430.200.000,- |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u>    |
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga, Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya) setelah perubahan Rp. 430.200.000,-

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
- |              |            |                      |
|--------------|------------|----------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 0,-                  |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>315.000.000,-</u> |
- Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 285.000.000,-
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- |              |            |                        |
|--------------|------------|------------------------|
| 1) Semula    | Rp.        | 24.373.406.676,-       |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>1.752.602.769,-</u> |
- Jumlah Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 26.126.009.445,-

c. Belanja ...

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 7.608.650.270,-        |
| 2) Berkurang                                       | <u>Rp. 1.965.283.414,-</u> |
| Jumlah Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan | Rp. 4.817.646.855,-        |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 31.014.514.202,-     |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 487.218.200,-</u> |
| Jumlah Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan | Rp. 31.501.732.402,-     |
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu Belanja Modal Tanah:
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 0,-                  |
| 2) Bertambah                                 | <u>Rp. 315.000.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan | Rp. 315.000.000,-        |
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar
- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) Semula   | Rp. 22.900.000,- |
| 2) Bertambah                                      | <u>Rp. 0,-</u>   |
| Jumlah Belanja Modal Alat Besar setelah perubahan | Rp. 22.900.000,- |
- b. Belanja Modal Alat Angkutan
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Semula   | Rp. 1.150.000.000,- |
| 2) Bertambah                                      | <u>Rp. 0,-</u>      |
| Jumlah Belanja Modal Alat Besar setelah perubahan | Rp. 1.150.000.000,- |
- c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 1.946.122.491,-      |
| 2) Berkurang  | <u>Rp. 657.496.640,-</u> |
| Jumlah Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga setelah perubahan | Rp. 2.603.619.131,-      |
- d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 225.076.000,-        |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 126.185.700,-</u> |
| Jumlah Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar setelah perubahan | Rp. 351.261.700,-        |
- e. Belanja Modal Alat Dokter dan Kesehatan
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 9.089.660.643,-      |
| 2) Bertambah   | <u>Rp. 195.050.000,-</u> |
| Jumlah Modal Alat Dokter dan Kesehatan setelah perubahan | Rp. 9.284.710.643,-      |
- f. Belanja Modal Alat Laboratorium
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 1.980.786.208,-        |
| 2) Berkurang                                     | <u>Rp. 1.158.896.499,-</u> |
| Jumlah Modal Alat Laboratorium setelah perubahan | Rp. 3.139.682.707,-        |
- g. Belanja Modal Komputer
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 1.826.168.337,-        |
| 2) Bertambah                                 | <u>Rp. 1.316.218.430,-</u> |
| Jumlah Modal Alat Komputer setelah perubahan | Rp. 3.142.386.767,-        |
- h. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 129.632.000,-       |
| 2) Berkurang  | <u>Rp. 10.000.000,-</u> |
| Jumlah Modal Alat Keselamatan Kerja setelah perubahan | Rp. 119.632.000,-       |

i. Belanja ...

- i. Belanja Modal Rambu-Rambu  
 1) Semula Rp. 450.942.997,-  
 2) Bertambah Rp. 0,-  
 Jumlah Modal Rambu-Rambu setelah perubahan Rp. 450.942.997,-
- j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS  
 1) Semula Rp. 3.865.980.000,-  
 2) Berkurang Rp. 516.311.500,-  
 Jumlah Modal Peralatan dan Mesin BOS setelah perubahan Rp. 3.349.668.500,-
- k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD  
 1) Semula Rp. 3.686.138.000,-  
 2) Berkurang Rp. 1.174.933.000,-  
 Jumlah Modal Peralatan dan Mesin BLUD setelah perubahan Rp. 2.511.205.000,-
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung  
 1) Semula Rp. 4.633.001.389,-  
 2) Berkurang Rp. 466.283.414,-  
 Jumlah Modal Bangunan Gedung setelah perubahan Rp. 4.166.717.795,-
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti  
 1) Semula Rp. 975.648.881,-  
 2) Bertambah Rp. 0,-  
 Jumlah Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti setelah perubahan Rp. 975.648.881,-
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD  
 1) Semula Rp. 2.000.000.000,-  
 2) Berkurang Rp. 1.500.000.000,-  
 Jumlah Modal Gedung dan Bangunan BLUD setelah perubahan Rp. 500.000.000,-
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan  
 1) Semula Rp. 17.374.011.265,-  
 2) Bertambah Rp. 806.920.799,-  
 Jumlah Modal Jalan dan Jembatan setelah perubahan Rp. 18.180.932.064,-
- b. Belanja Modal Bangunan Air  
 1) Semula Rp. 10.935.404.287,-  
 2) Bertambah Rp. 561.700.000,-  
 Jumlah Modal Bangunan Air setelah perubahan Rp. 11.497.104.287,-
- c. Belanja Modal Instalasi  
 1) Semula Rp. 2.705.098.650,-  
 2) Berkurang Rp. 300.000.000,-  
 Jumlah Modal Instalasi setelah perubahan Rp. 2.405.098.650,-

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, yaitu Belanja Tidak Terduga:
- 1) Semula Rp. 2.000.000.000,-  
 2) Berkurang Rp. 1.236.203.960,-  
 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 736.796.040,-

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
    - 1) Semula Rp. 2.575.382.300,-
    - 2) Bertambah Rp. 34.436.432,-
    - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 2.609.818.732,-
  - b. Belanja Bantuan Keuangan
    - 1) Semula Rp. 100.104.066.700,-
    - 2) Bertambah Rp. 2.196.127.691,-
    - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp. 102.300.194.391,-

Pasal 10

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
  - 1) Semula Rp. 17.468.054.519,-
  - 2) Bertambah Rp. 21.199.559.743,-
  - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 38.667.614.262,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan
  - 1) Semula Rp. 500.000.000,-
  - 2) Bertambah Rp. 0,-
  - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 500.000.000,-

Pasal 11

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya yaitu :

- a. Semula Rp. 17.468.054.519,-
- b. Bertambah Rp. 21.199.559.742,-
- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 38.667.614.261,-

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan PAD
  - 1) Semula Rp. 0,-
  - 2) Bertambah Rp. 6.393.229.242,-
  - Jumlah Pelampauan Penerimaan PAD setelah perubahan Rp. 6.393.229.242,-
- b. Penghematan Belanja
  - 1) Semula Rp. 0,-
  - 2) Bertambah Rp. 2.365.697.497,-
  - Jumlah Penghematan setelah Perubahan Rp. 2.365.697.497,-
- c. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
  - 1) Semula Rp. 17.468.054.519,-
  - 2) Bertambah Rp. 5.476.110.885,-
  - Jumlah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 22.944.165.404,-

2) Bertambah ...

d. Sisa Belanja Lainnya

1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah	Rp.	<u>6.964.522.118,-</u>
Jumlah Sisa Belanja Lainnya setelah Perubahan	Rp.	6.964.522.118,-

Pasal 12

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah yaitu:

a. Semula	Rp.	500.000.000,-
b. Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>
Jumlah Ppenyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp.	500.000.000,-

Pasal 13

Uraian lebih lanjut Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran XI Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kota Langsa pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 14

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 8 November 2023 M  
24 Rabiul Akhir 1445 H



Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 8 November 2023 M  
24 Rabiul Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 1059



**KOTA LANGSA**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>148.049.743.069</b>	<b>165.439.504.923</b>	<b>17.389.761.854</b>	<b>12 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	21.015.000.000	21.650.638.093	635.638.093	3 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	500.000.000	600.000.000	100.000.000	20 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	500.000.000	600.000.000	100.000.000	20 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	500.000.000	600.000.000	100.000.000	20 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.500.000.000	1.300.000.000	(200.000.000)	13 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000	1.300.000.000	(200.000.000)	13 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.500.000.000	1.300.000.000	(200.000.000)	13 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	35.000.000	48.000.000	13.000.000	37 %
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	35.000.000	48.000.000	13.000.000	37 %
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	35.000.000	48.000.000	13.000.000	37 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	750.000.000	400.000.000	(350.000.000)	47 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000	400.000.000	(350.000.000)	47 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000	400.000.000	(350.000.000)	47 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	9.480.000.000	9.158.463.093	(321.536.907)	3 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	9.480.000.000	9.158.463.093	(321.536.907)	3 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	9.480.000.000	9.158.463.093	(321.536.907)	3 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	50.000.000	70.000.000	20.000.000	40 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	50.000.000	70.000.000	20.000.000	40 %
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	50.000.000	70.000.000	20.000.000	40 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000	72.000.000	(28.000.000)	28 %
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100.000.000	72.000.000	(28.000.000)	28 %

4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000	72.000.000	(28.000.000)	28 %
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	27.175.000	(22.825.000)	46 %
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	27.175.000	(22.825.000)	46 %
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	27.175.000	(22.825.000)	46 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	760.000.000	575.000.000	(185.000.000)	24 %
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	760.000.000	575.000.000	(185.000.000)	24 %
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	760.000.000	575.000.000	(185.000.000)	24 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.790.000.000	4.700.000.000	910.000.000	24 %
4.1.01.15.01	PBBP2	3.790.000.000	4.700.000.000	910.000.000	24 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.790.000.000	4.700.000.000	910.000.000	24 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000	4.700.000.000	700.000.000	18 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000	4.700.000.000	700.000.000	18 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000	4.700.000.000	700.000.000	18 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.738.823.000	4.447.549.234	(291.273.766)	6 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.607.600.000	2.657.600.000	50.000.000	2 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	560.600.000	610.600.000	50.000.000	9 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	560.600.000	610.600.000	50.000.000	9 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	365.000.000	365.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	365.000.000	365.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000	750.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000	750.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	550.000.000	550.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	550.000.000	550.000.000	0	0 %
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	17.000.000	17.000.000	0	0 %
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	17.000.000	17.000.000	0	0 %
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	115.000.000	115.000.000	0	0 %
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	115.000.000	115.000.000	0	0 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	35.000.000	35.000.000	0	0 %
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	35.000.000	35.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	215.000.000	215.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	215.000.000	215.000.000	0	0 %

4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.680.700.000	1.349.426.234	(331.273.766)	20 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.579.700.000	1.235.426.234	(344.273.766)	22 %
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.051.800.000	730.026.234	(321.773.766)	31 %
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	77.900.000	43.000.000	(34.900.000)	45 %
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	400.000.000	412.400.000	12.400.000	3 %
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	31.500.000	31.500.000	0	0 %
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	31.500.000	31.500.000	0	0 %
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	41.500.000	41.500.000	0	0 %
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	41.500.000	41.500.000	0	0 %
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000	5.000.000	0	0 %
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000	8.000.000	5.000.000	167 %
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000	8.000.000	5.000.000	167 %
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.000.000	28.000.000	8.000.000	40 %
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	20.000.000	28.000.000	8.000.000	40 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	450.523.000	440.523.000	(10.000.000)	2 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	423.000.000	423.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	423.000.000	423.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	50 %
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	50 %
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	7.523.000	7.523.000	0	0 %
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	7.523.000	7.523.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.290.000.000	948.109.076	(341.890.924)	27 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.290.000.000	948.109.076	(341.890.924)	27 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.290.000.000	948.109.076	(341.890.924)	27 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.290.000.000	948.109.076	(341.890.924)	27 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	121.005.920.069	138.393.208.520	17.387.288.451	14 %
4.1.04.05	Jasa Giro	800.000.000	200.000.000	(600.000.000)	75 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000	200.000.000	(600.000.000)	75 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000	200.000.000	(600.000.000)	75 %

4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000	150.000.000	(1.350.000.000)	90 %
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000	150.000.000	(1.350.000.000)	90 %
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000	150.000.000	(1.350.000.000)	90 %
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0	29.913.200	29.913.200	100 %
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0	5.900.000	5.900.000	100 %
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0	5.900.000	5.900.000	100 %
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0	24.013.200	24.013.200	100 %
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0	24.013.200	24.013.200	100 %
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	1.144.964.944	1.144.964.944	100 %
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	1.144.964.944	1.144.964.944	100 %
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	1.144.964.944	1.144.964.944	100 %
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	173.681.403	173.681.403	100 %
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0	6.250	6.250	100 %
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0	6.250	6.250	100 %
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0	469.703	469.703	100 %
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0	469.703	469.703	100 %
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0	1.054.306	1.054.306	100 %
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0	1.054.306	1.054.306	100 %
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0	154.400	154.400	100 %
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0	154.400	154.400	100 %
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	18.380	18.380	100 %
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	18.380	18.380	100 %
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0	171.978.364	171.978.364	100 %
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0	171.978.364	171.978.364	100 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	600.000.000	871.845.475	271.845.475	45 %
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000	650.000.000	350.000.000	117 %
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000	650.000.000	350.000.000	117 %
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	300.000.000	50.000.000	(250.000.000)	83 %
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	300.000.000	50.000.000	(250.000.000)	83 %
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	84.026.876	84.026.876	100 %

4.1.04.15.10.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	0	62.825.876	62.825.876	100 %
4.1.04.15.10.0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0	21.201.000	21.201.000	100 %
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0	57.899.624	57.899.624	100 %
4.1.04.15.16.0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0	1.430.000	1.430.000	100 %
4.1.04.15.16.0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	0	15.382.800	15.382.800	100 %
4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0	21.773.400	21.773.400	100 %
4.1.04.15.16.0157	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	19.313.424	19.313.424	100 %
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0	26.318.975	26.318.975	100 %
4.1.04.15.34.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0	26.318.975	26.318.975	100 %
4.1.04.15.37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0	3.600.000	3.600.000	100 %
4.1.04.15.37.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0	3.600.000	3.600.000	100 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	112.852.182.671	128.415.781.591	15.563.598.920	14 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	112.852.182.671	128.415.781.591	15.563.598.920	14 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	112.852.182.671	128.415.781.591	15.563.598.920	14 %
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	1.228.737.398	1.367.779.707	139.042.309	11 %
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.228.737.398	1.367.779.707	139.042.309	11 %
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.228.737.398	1.367.779.707	139.042.309	11 %
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	39.242.200	39.242.200	100 %
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	39.242.200	39.242.200	100 %
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	39.242.200	39.242.200	100 %
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	4.025.000.000	6.000.000.000	1.975.000.000	49 %
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	4.025.000.000	6.000.000.000	1.975.000.000	49 %
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	2.025.000.000	3.000.000.000	975.000.000	48 %
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	2.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000	50 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>677.748.666.358</b>	<b>699.696.253.642</b>	<b>21.947.587.284</b>	<b>3 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	620.822.143.000	640.674.249.036	19.852.106.036	3 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	564.276.403.000	565.874.114.036	1.597.711.036	0 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.091.970.000	15.503.366.911	2.411.396.911	18 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.928.789.000	1.130.991.295	(797.797.705)	41 %

4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.788.051.000	4.772.653.614	(1.015.397.386)	18 %
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0	64.659.409	64.659.409	100 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	186.027.000	284.296.100	98.269.100	53 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.206.594.000	586.548.020	(620.045.980)	51 %
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.597.000	23.730	(8.573.270)	100 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.633.366.000	7.777.295.290	5.143.929.290	195 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	39.169.000	54.255.998	15.086.998	39 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.301.377.000	832.643.455	(468.733.545)	36 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	422.491.297.000	422.491.297.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	411.786.829.000	411.786.829.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10.704.468.000	10.704.468.000	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.890.469.000	54.890.469.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	441.905.000	441.905.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.563.882.000	2.563.882.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	7.208.422.000	7.208.422.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.531.871.000	1.531.871.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	15.620.838.000	15.620.838.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.049.000.000	5.049.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6.227.878.000	6.227.878.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	11.797.867.000	11.797.867.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	476.307.000	476.307.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.972.499.000	3.972.499.000	0	0 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	73.802.667.000	72.988.981.125	(813.685.875)	1 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	19.329.900.000	19.412.106.084	82.206.084	0 %
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.925.000.000	1.925.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	29.348.268.000	29.348.268.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	909.000.000	909.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.315.600.000	3.284.100.000	(31.500.000)	1 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.208.300.000	3.207.800.000	(500.000)	0 %
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000	699.974.662	(25.338)	0 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.571.645.000	10.116.442.494	(455.202.506)	4 %

4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	334.994.000	334.994.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.399.040.000	2.103.792.610	(295.247.390)	12 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	406.900.000	399.067.580	(7.832.420)	2 %
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000	494.904.295	(103.095.705)	17 %
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	335.650.000	334.491.400	(1.158.600)	0 %
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	420.370.000	419.040.000	(1.330.000)	0 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	16.299.407.000	16.299.407.000	100 %
4.2.01.02.01	DID	0	16.299.407.000	16.299.407.000	100 %
4.2.01.02.01.0001	DID	0	16.299.407.000	16.299.407.000	100 %
4.2.01.05	Dana Desa	56.545.740.000	58.500.728.000	1.954.988.000	3 %
4.2.01.05.01	Dana Desa	56.545.740.000	58.500.728.000	1.954.988.000	3 %
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	56.545.740.000	58.500.728.000	1.954.988.000	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.926.523.358	59.022.004.606	2.095.481.248	4 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	27.123.797.394	30.777.295.949	3.653.498.555	13 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	27.123.797.394	30.777.295.949	3.653.498.555	13 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.400.606.122	5.548.856.926	148.250.804	3 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.729.571.105	3.243.643.181	514.072.076	19 %
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.175.153.765	9.615.717.879	1.440.564.114	18 %
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	29.723.383	32.172.084	2.448.701	8 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.788.743.019	12.336.905.879	1.548.162.860	14 %
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	29.802.725.964	28.244.708.657	(1.558.017.307)	5 %
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	29.802.725.964	28.244.708.657	(1.558.017.307)	5 %
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	29.802.725.964	28.244.708.657	(1.558.017.307)	5 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0 %
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0	0	0	0 %
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0	0	0	0 %
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0	0	0	0 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>825.798.409.427</b>	<b>865.135.758.565</b>	<b>39.337.349.138</b>	<b>5 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				

<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>675.090.443.798</b>	<b>733.490.052.361</b>	<b>58.399.608.563</b>	<b>9 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	328.572.421.831	320.897.299.268	(7.675.122.563)	2 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	236.297.172.495	230.635.885.565	(5.661.286.930)	2 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	180.863.728.978	177.053.417.265	(3.810.311.713)	2 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	170.396.344.036	168.975.454.797	(1.420.889.239)	1 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.467.384.942	8.077.962.468	(2.389.422.474)	23 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.041.350.420	14.764.519.429	(276.830.991)	2 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.250.650.230	14.136.632.570	(114.017.660)	1 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	790.700.190	627.886.859	(162.813.331)	21 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.552.393.600	5.467.518.554	(84.875.046)	2 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.552.393.600	5.467.518.554	(84.875.046)	2 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.322.315.700	11.716.943.154	394.627.454	3 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.226.921.100	11.574.192.954	347.271.854	3 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	95.394.600	142.750.200	47.355.600	50 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.747.895.804	3.387.440.425	(360.455.379)	10 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.128.393.704	2.918.537.575	(209.856.129)	7 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	619.502.100	468.902.850	(150.599.250)	24 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.838.154.523	9.496.441.309	(341.713.214)	3 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.205.648.567	9.005.633.032	(200.015.535)	2 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	632.505.956	490.808.277	(141.697.679)	22 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	579.861.354	856.139.508	276.278.154	48 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	579.861.354	856.139.508	276.278.154	48 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.371.707	3.135.005	(236.702)	7 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.253.533	3.018.208	(235.325)	7 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	118.174	116.797	(1.377)	1 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	6.758.372.702	6.421.083.512	(337.289.190)	5 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.465.151.370	6.218.687.082	(246.464.288)	4 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	293.221.332	202.396.430	(90.824.902)	31 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	411.612.245	369.203.403	(42.408.842)	10 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	383.247.858	352.194.344	(31.053.514)	8 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	28.364.387	17.009.059	(11.355.328)	40 %



5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.200.535.720	1.100.044.001	(100.491.719)	8 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.117.806.256	1.049.020.479	(68.785.777)	6 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	82.729.464	51.023.522	(31.705.942)	38 %
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	977.579.742	0	(977.579.742)	100 %
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	921.289.317	0	(921.289.317)	100 %
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	56.290.425	0	(56.290.425)	100 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.221.633.871	47.988.286.758	(2.233.347.113)	4 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.864.394.646	15.393.300.930	(471.093.716)	3 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15.736.324.011	15.254.932.242	(481.391.769)	3 %
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	128.070.635	138.368.688	10.298.053	8 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.486.821.990	4.892.186.831	(594.635.159)	11 %
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.453.306.922	4.848.998.783	(604.308.139)	11 %
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	33.515.068	43.188.048	9.672.980	29 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	44.135.848	45.544.015	1.408.167	3 %
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	44.135.848	45.544.015	1.408.167	3 %
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	28.826.281.387	27.657.254.982	(1.169.026.405)	4 %
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	28.581.918.444	27.441.397.405	(1.140.521.039)	4 %
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	244.362.943	215.857.577	(28.505.366)	12 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.371.179.150	33.537.477.630	166.298.480	0 %
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.050.750.000	726.300.000	(324.450.000)	31 %
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	25.000.000	13.000.000	(12.000.000)	48 %
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	75.000.000	69.000.000	(6.000.000)	8 %
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.750.000	1.200.000	(550.000)	31 %
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	37.500.000	19.500.000	(18.000.000)	48 %
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	474.000.000	340.000.000	(134.000.000)	28 %
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.500.000	1.800.000	(700.000)	28 %
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.000.000	4.300.000	(700.000)	14 %
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000	500.000	(2.000.000)	80 %
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38.000.000	23.500.000	(14.500.000)	38 %
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	189.500.000	100.000.000	(89.500.000)	47 %
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	200.000.000	153.500.000	(46.500.000)	23 %

5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	212.181.150	174.746.150	(37.435.000)	18 %
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	3.270.000	3.270.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.250.000	18.250.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	39.050.000	39.050.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	850.000	850.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	5.750.000	5.750.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.750.000	1.750.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.750.000	10.750.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	77.435.000	40.000.000	(37.435.000)	48 %
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	27.500.000	27.500.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1.575.000	1.575.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.075.000	2.075.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	250.000	250.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.000	150.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.000.000	1.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	21.150.000	21.150.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000	1.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	376.150	376.150	0	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	29.348.268.000	29.622.856.480	274.588.480	1 %
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	29.348.268.000	29.622.856.480	274.588.480	1 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	909.000.000	1.184.440.000	275.440.000	30 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	909.000.000	1.184.440.000	275.440.000	30 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.850.980.000	1.829.135.000	(21.845.000)	1 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.843.420.000	1.821.575.000	(21.845.000)	1 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.560.000	7.560.000	0	0 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.161.356.315	8.014.569.315	(146.787.000)	2 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000	561.540.000	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000	561.540.000	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600	72.441.600	(6.174.000)	8 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600	72.441.600	(6.174.000)	8 %

5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	90.694.000	93.354.000	2.660.000	3 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	90.694.000	93.354.000	2.660.000	3 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.220.500	48.220.500	0	0 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.220.500	48.220.500	0	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000	814.359.000	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000	814.359.000	0	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.839.900	79.839.900	0	0 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	79.839.900	79.839.900	0	0 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900	10.413.900	0	0 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900	10.413.900	0	0 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000	1.890.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000	1.890.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000	0	(157.500.000)	100 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000	0	(157.500.000)	100 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	230.000.000	241.207.000	11.207.000	5 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	230.000.000	241.207.000	11.207.000	5 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.560.173.415	1.556.893.415	(3.280.000)	0 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	53.203.415	47.703.415	(5.500.000)	10 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	149.170.000	140.170.000	(9.000.000)	6 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	11.400.000	11.400.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.346.400.000	1.357.620.000	11.220.000	1 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.640.000.000	2.640.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.640.000.000	2.640.000.000	0	0 %
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0	6.300.000	6.300.000	100 %
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0	6.300.000	6.300.000	100 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	10.200.000	10.200.000	0	0 %
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000	8.200.000	0	0 %
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000	8.200.000	0	0 %
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000	600.000	0	0 %
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000	600.000	0	0 %
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000	1.400.000	0	0 %

5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000	1.400.000	0	0 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000	710.880.000	200.000.000	39 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	0	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	0	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	600.000.000	200.000.000	50 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	600.000.000	200.000.000	50 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.259.825.611	320.695.290.914	38.435.465.303	14 %
5.1.02.01	Belanja Barang	43.480.418.249	54.121.218.510	10.640.800.261	24 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.478.850.149	54.119.650.410	10.640.800.261	24 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	115.454.543	70.519.301	(44.935.242)	39 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.000.000	600.000	(5.400.000)	90 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.953.738.072	2.820.303.664	(133.434.408)	5 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.765.037.933	1.765.037.933	0	0 %
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.236.080	2.236.080	0	0 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	24.760.000	23.960.000	(800.000)	3 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.607.002.465	5.739.477.614	4.132.475.149	257 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	790.973.253	898.079.314	107.106.061	14 %
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	199.999.500	199.999.500	0	0 %
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0	5.208.500	5.208.500	100 %
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	511.386.819	620.312.448	108.925.629	21 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.216.390.480	3.619.981.608	403.591.128	13 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.138.723.925	4.693.162.430	554.438.505	13 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	299.520.000	349.620.000	50.100.000	17 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	85.658.000	175.480.000	89.822.000	105 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	772.781.640	885.001.850	112.220.210	15 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	72.640.000	181.630.000	108.990.000	150 %
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0	22.000.000	22.000.000	100 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	531.390.000	585.930.000	54.540.000	10 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	574.209.000	635.794.300	61.585.300	11 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.630.770.192	2.635.237.227	4.467.035	0 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	291.495.113	506.633.507	215.138.394	74 %

5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.799.200.000	11.760.024.000	1.960.824.000	20 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	572.392.180	2.624.458.180	2.052.066.000	359 %
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	632.500	632.500	0	0 %
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	1.384.740.000	1.384.740.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.422.460.454	2.619.313.454	196.853.000	8 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.747.780.000	2.992.563.000	244.783.000	9 %
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	374.900.000	374.900.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	83.000.000	75.000.000	(8.000.000)	10 %
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	34.650.000	19.550.000	(15.100.000)	44 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.609.445.000	3.705.392.000	95.947.000	3 %
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	6.000.000	15.000.000	9.000.000	150 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	215.000.000	223.000.000	8.000.000	4 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	191.000.000	201.000.000	10.000.000	5 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	35.538.000	140.923.000	105.385.000	297 %
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	112.500.000	112.500.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	22.750.000	68.250.000	45.500.000	200 %
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	700.000	2.100.000	1.400.000	200 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	626.720.000	772.880.000	146.160.000	23 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	242.500.000	249.023.600	6.523.600	3 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	256.775.000	192.195.400	(64.579.600)	25 %
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	150.000.000	150.000.000	0	0 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.568.100	1.568.100	0	0 %
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.568.100	1.568.100	0	0 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	80.788.495.020	79.809.007.563	(979.487.457)	1 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	73.886.276.525	72.492.111.797	(1.394.164.728)	2 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.623.500.000	3.567.400.000	(56.100.000)	2 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.649.535.000	3.592.855.000	(56.680.000)	2 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.230.730.000	1.227.530.000	(3.200.000)	0 %
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	30.000.000	55.000.000	25.000.000	83 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	849.600.000	849.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	683.200.000	575.200.000	(108.000.000)	16 %

5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.303.501.309	8.661.180.060	(642.321.249)	7 %
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	9.600.000	9.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	224.400.000	224.400.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.913.440.000	6.924.240.000	10.800.000	0 %
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.200.640.000	3.200.640.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	385.800.000	382.800.000	(3.000.000)	1 %
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	795.600.000	795.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	153.600.000	153.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	357.000.000	357.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.500.000	10.350.000	(150.000)	1 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.552.500.000	7.286.100.000	(266.400.000)	4 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	557.400.000	547.400.000	(10.000.000)	2 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.890.170.000	2.822.187.500	(67.982.500)	2 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.867.502.632	2.987.502.632	120.000.000	4 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.185.640.000	9.171.440.000	(14.200.000)	0 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.340.840.000	2.336.040.000	(4.800.000)	0 %
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	204.000.000	204.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.081.600.000	1.092.000.000	10.400.000	1 %
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	30.600.000	30.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	73.890.000	72.540.000	(1.350.000)	2 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20.800.000	28.600.000	7.800.000	38 %
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	0	8.500.000	8.500.000	100 %
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	160.900.000	159.100.000	(1.800.000)	1 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0	11.260.000	11.260.000	100 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	402.500.000	402.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	132.500.000	110.000.000	(22.500.000)	17 %
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	18.700.000	18.700.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	175.000.000	195.000.000	20.000.000	11 %
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	50.000.000	20.000.000	(30.000.000)	60 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.390.395.000	2.340.395.000	(50.000.000)	2 %
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	43.200.000	43.200.000	0	0 %

5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	111.400.000	160.060.800	48.660.800	44 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	315.264.837	359.044.007	43.779.170	14 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.812.646.157	9.226.874.748	(585.771.409)	6 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	213.300.000	203.100.000	(10.200.000)	5 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.007.994.990	1.268.379.050	260.384.060	26 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	151.509.600	136.009.600	(15.500.000)	10 %
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0	6.997.400	6.997.400	100 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	454.177.000	438.886.000	(15.291.000)	3 %
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	103.700.000	103.700.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	112.500.000	110.000.000	(2.500.000)	2 %
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.435.215.136	1.351.482.136	(83.733.000)	6 %
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	189.638.400	189.638.400	0	0 %
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	702.374.400	585.312.000	(117.062.400)	17 %
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	458.202.336	491.531.736	33.329.400	7 %
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	85.000.000	85.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	687.348.000	1.148.695.100	461.347.100	67 %
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	99.704.000	99.704.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	210.948.000	270.160.000	59.212.000	28 %
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	12.000.000	12.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.496.000	7.500.000	(2.996.000)	29 %
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	24.000.000	24.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	0	27.169.100	27.169.100	100 %
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	0	4.000.000	4.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	150.000.000	242.500.000	92.500.000	62 %
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0	17.000.000	17.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	180.200.000	444.662.000	264.462.000	147 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.469.972.800	1.532.872.800	62.900.000	4 %
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	55.000.000	70.000.000	15.000.000	27 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	799.672.800	824.872.800	25.200.000	3 %
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	130.000.000	192.500.000	62.500.000	48 %

5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	16.300.000	14.800.000	(1.500.000)	9 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0	200.000.000	200.000.000	100 %
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	469.000.000	230.700.000	(238.300.000)	51 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	850.702.559	1.049.725.730	199.023.171	23 %
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	348.972.891	392.557.560	43.584.669	12 %
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0	200.000.000	200.000.000	100 %
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	160.000.000	160.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	241.729.668	197.168.170	(44.561.498)	18 %
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.000.000	34.420.000	24.420.000	244 %
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	10.000.000	34.420.000	24.420.000	244 %
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.1.02.02.10.0015	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	62.000.000	62.000.000	0	0 %
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	42.000.000	42.000.000	0	0 %
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.176.980.000	1.927.700.000	(249.280.000)	11 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	824.990.000	749.010.000	(75.980.000)	9 %
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	892.120.000	875.900.000	(16.220.000)	2 %
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	345.980.000	188.900.000	(157.080.000)	45 %
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	113.890.000	113.890.000	0	0 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.321.788.695	5.351.271.266	1.029.482.571	24 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.298.357.104	3.127.792.155	829.435.051	36 %
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	200.300.000	384.509.804	184.209.804	92 %
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	76.248.000	120.726.000	44.478.000	58 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	124.162.500	124.162.500	0	0 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	782.774.772	1.292.774.772	510.000.000	65 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	93.831.832	74.939.079	(18.892.753)	20 %
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	120.640.000	123.680.000	3.040.000	3 %



5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	395.100.000	393.300.000	(1.800.000)	0 %
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	40.000.000	75.000.000	35.000.000	88 %
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	75.000.000	45.000.000	(30.000.000)	40 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	305.500.000	388.500.000	83.000.000	27 %
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	84.800.000	105.200.000	20.400.000	24 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.023.431.591	2.023.479.111	47.520	0 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.898.431.591	1.898.479.111	47.520	0 %
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	75.000.000	75.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	200.000.000	200.000.000	100 %
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	0	150.000.000	150.000.000	100 %
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.658.758.976	24.571.376.581	4.912.617.605	25 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.658.758.976	24.571.376.581	4.912.617.605	25 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.391.518.300	17.397.709.905	5.006.191.605	40 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.267.240.676	7.173.666.676	(93.574.000)	1 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.455.400.000	9.445.650.000	(9.750.000)	0 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.444.300.000	9.444.150.000	(150.000)	0 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	794.300.000	672.500.000	(121.800.000)	15 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	21.250.000	62.900.000	41.650.000	196 %
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	68.750.000	148.750.000	80.000.000	116 %
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	8.560.000.000	8.560.000.000	0	0 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.100.000	1.500.000	(9.600.000)	86 %
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	11.100.000	1.500.000	(9.600.000)	86 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.388.920.000	15.239.137.584	(2.149.782.416)	12 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.388.920.000	15.239.137.584	(2.149.782.416)	12 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.388.920.000	15.239.137.584	(2.149.782.416)	12 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.166.044.671	132.157.629.410	24.991.584.739	23 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.166.044.671	132.157.629.410	24.991.584.739	23 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.166.044.671	132.157.629.410	24.991.584.739	23 %
5.1.04	Belanja Subsidi	975.330.000	895.330.000	(80.000.000)	8 %

5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	676.930.000	676.930.000	0	0 %
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	676.930.000	676.930.000	0	0 %
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	676.930.000	676.930.000	0	0 %
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	298.400.000	218.400.000	(80.000.000)	27 %
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	298.400.000	218.400.000	(80.000.000)	27 %
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	298.400.000	218.400.000	(80.000.000)	27 %
5.1.05	Belanja Hibah	33.219.590.702	49.721.563.945	16.501.973.243	50 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.444.120.684	46.197.793.927	13.753.673.243	42 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.991.441.960	17.420.428.016	3.428.986.056	25 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.238.900.000	11.338.900.000	3.100.000.000	38 %
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.752.541.960	6.081.528.016	328.986.056	6 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.139.000.000	6.252.000.000	1.113.000.000	22 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.139.000.000	6.252.000.000	1.113.000.000	22 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.313.678.724	22.525.365.911	9.211.687.187	69 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.630.000.000	13.098.229.243	8.468.229.243	183 %
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.683.678.724	9.427.136.668	743.457.944	9 %
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0	2.748.300.000	2.748.300.000	100 %
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0	1.735.200.000	1.735.200.000	100 %
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0	1.735.200.000	1.735.200.000	100 %
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0	1.013.100.000	1.013.100.000	100 %
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0	1.013.100.000	1.013.100.000	100 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018	775.470.018	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018	775.470.018	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018	775.470.018	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.063.275.654	41.280.568.234	11.217.292.580	37 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	20.050.328.452	22.799.495.071	2.749.166.619	14 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	345.980.000	356.180.000	10.200.000	3 %
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	345.980.000	356.180.000	10.200.000	3 %
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	19.704.348.452	22.443.315.071	2.738.966.619	14 %

5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	19.704.348.452	22.443.315.071	2.738.966.619	14 %
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	9.582.747.202	18.050.873.163	8.468.125.961	88 %
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.455.000.000	1.170.000.000	(285.000.000)	20 %
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.455.000.000	1.170.000.000	(285.000.000)	20 %
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.127.747.202	16.880.873.163	8.753.125.961	108 %
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.127.747.202	16.880.873.163	8.753.125.961	108 %
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.200.000	430.200.000	0	0 %
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.200.000	430.200.000	0	0 %
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	430.200.000	430.200.000	0	0 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>62.996.571.148</b>	<b>64.166.511.302</b>	<b>1.169.940.154</b>	<b>2 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	315.000.000	315.000.000	100 %
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0	315.000.000	315.000.000	100 %
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	0	315.000.000	315.000.000	100 %
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0	30.000.000	30.000.000	100 %
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	0	285.000.000	285.000.000	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.373.406.676	26.126.009.445	1.752.602.769	7 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	22.900.000	22.900.000	0	0 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	22.900.000	22.900.000	0	0 %
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	2.900.000	2.900.000	0	0 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.150.000.000	1.150.000.000	0	0 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.150.000.000	1.150.000.000	0	0 %
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	150.000.000	150.000.000	0	0 %
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.946.122.491	2.603.619.131	657.496.640	34 %
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	40.000.000	40.000.000	0	0 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.000.000	40.000.000	0	0 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.874.296.691	2.531.793.331	657.496.640	35 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	790.803.273	1.514.673.273	723.870.000	92 %
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	2.730.000	2.730.000	0	0 %

5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	337.747.118	432.199.018	94.451.900	28 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	743.016.300	582.191.040	(160.825.260)	22 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.825.800	31.825.800	0	0 %
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	1.903.000	1.903.000	0	0 %
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	29.922.800	29.922.800	0	0 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	225.076.000	351.261.700	126.185.700	56 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	167.496.000	262.261.700	94.765.700	57 %
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0	28.080.000	28.080.000	100 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	108.084.900	157.871.500	49.786.600	46 %
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0	3.433.100	3.433.100	100 %
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	23.736.000	21.652.000	(2.084.000)	9 %
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	35.675.100	51.225.100	15.550.000	44 %
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	57.580.000	87.000.000	29.420.000	51 %
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	55.000.000	70.420.000	15.420.000	28 %
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	2.580.000	16.580.000	14.000.000	543 %
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0	2.000.000	2.000.000	100 %
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0	2.000.000	2.000.000	100 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.089.660.643	9.284.710.643	195.050.000	2 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	50 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	50 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	9.087.260.643	9.283.510.643	196.250.000	2 %
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	9.087.260.643	9.283.510.643	196.250.000	2 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.980.786.208	3.139.682.707	1.158.896.499	59 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.980.786.208	3.139.682.707	1.158.896.499	59 %
5.2.02.08.01.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	1.980.786.208	3.139.682.707	1.158.896.499	59 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.826.168.337	3.142.386.767	1.316.218.430	72 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.149.752.276	2.206.741.274	1.056.988.998	92 %
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0	345.000.000	345.000.000	100 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.149.752.276	1.861.741.274	711.988.998	62 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	676.416.061	935.645.493	259.229.432	38 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	676.416.061	920.445.493	244.029.432	36 %

5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0	6.000.000	6.000.000	100 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	9.200.000	9.200.000	100 %
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	129.632.000	119.632.000	(10.000.000)	8 %
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	10.000.000	0	(10.000.000)	100 %
5.2.02.15.01.0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	10.000.000	0	(10.000.000)	100 %
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	119.632.000	119.632.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	5.200.000	5.200.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	99.550.000	99.550.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	14.882.000	14.882.000	0	0 %
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	450.942.997	450.942.997	0	0 %
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	450.942.997	450.942.997	0	0 %
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	450.942.997	450.942.997	0	0 %
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.865.980.000	3.349.668.500	(516.311.500)	13 %
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.865.980.000	3.349.668.500	(516.311.500)	13 %
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.865.980.000	3.349.668.500	(516.311.500)	13 %
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.686.138.000	2.511.205.000	(1.174.933.000)	32 %
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.686.138.000	2.511.205.000	(1.174.933.000)	32 %
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.686.138.000	2.511.205.000	(1.174.933.000)	32 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.608.650.270	5.642.366.856	(1.966.283.414)	26 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.633.001.389	4.166.717.975	(466.283.414)	10 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.118.001.389	3.651.717.975	(466.283.414)	11 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.822.886.580	2.157.419.665	334.533.085	18 %
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0	150.000.000	150.000.000	100 %
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1.258.896.499	0	(1.258.896.499)	100 %
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	300.000.000	300.000.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	624.410.800	774.410.800	150.000.000	24 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	93.457.944	93.457.944	0	0 %
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0	108.080.000	108.080.000	100 %
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	18.349.566	18.349.566	0	0 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	515.000.000	515.000.000	0	0 %

5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	515.000.000	515.000.000	0	0 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	975.648.881	975.648.881	0	0 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	975.648.881	975.648.881	0	0 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	975.648.881	975.648.881	0	0 %
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000	500.000.000	(1.500.000.000)	75 %
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000	500.000.000	(1.500.000.000)	75 %
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000	500.000.000	(1.500.000.000)	75 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.014.514.202	32.083.135.001	1.068.620.799	3 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	17.374.011.265	18.180.932.064	806.920.799	5 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	15.600.822.013	16.199.382.813	598.560.800	4 %
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	13.745.538.013	14.344.098.813	598.560.800	4 %
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.855.284.000	1.855.284.000	0	0 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.773.189.252	1.981.549.251	208.359.999	12 %
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	923.189.252	1.131.549.251	208.359.999	23 %
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	850.000.000	850.000.000	0	0 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.935.404.287	11.497.104.287	561.700.000	5 %
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	5.777.620.287	6.221.620.287	444.000.000	8 %
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	5.777.620.287	6.221.620.287	444.000.000	8 %
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	117.700.000	117.700.000	100 %
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	117.700.000	117.700.000	100 %
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.157.784.000	5.157.784.000	0	0 %
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.157.784.000	5.157.784.000	0	0 %
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.705.098.650	2.405.098.650	(300.000.000)	11 %
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	600.000.000	300.000.000	(300.000.000)	50 %
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	600.000.000	0	(600.000.000)	100 %
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0	300.000.000	300.000.000	100 %
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	2.105.098.650	2.105.098.650	0	0 %
5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	2.105.098.650	2.105.098.650	0	0 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>736.796.040</b>	<b>(1.263.203.960)</b>	<b>63 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	736.796.040	(1.263.203.960)	63 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	736.796.040	(1.263.203.960)	63 %

5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	736.796.040	(1.263.203.960)	63 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	736.796.040	(1.263.203.960)	63 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>102.679.449.000</b>	<b>104.910.013.123</b>	<b>2.230.564.123</b>	<b>2 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.575.382.300	2.609.818.732	34.436.432	1 %
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.101.500.000	2.165.063.809	63.563.809	3 %
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.101.500.000	2.165.063.809	63.563.809	3 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.101.500.000	2.165.063.809	63.563.809	3 %
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	473.882.300	444.754.923	(29.127.377)	6 %
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	473.882.300	444.754.923	(29.127.377)	6 %
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	473.882.300	444.754.923	(29.127.377)	6 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.104.066.700	102.300.194.391	2.196.127.691	2 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	100.104.066.700	102.300.194.391	2.196.127.691	2 %
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	100.104.066.700	102.300.194.391	2.196.127.691	2 %
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	56.545.740.000	58.500.728.000	1.954.988.000	3 %
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	43.558.326.700	43.799.466.391	241.139.691	1 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>842.766.463.946</b>	<b>903.303.372.826</b>	<b>60.536.908.880</b>	<b>7 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(16.968.054.519)</b>	<b>(38.167.614.261)</b>	<b>(21.199.559.742)</b>	<b>-125 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>17.468.054.519</b>	<b>38.667.614.261</b>	<b>21.199.559.742</b>	<b>121 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.468.054.519	38.667.614.261	21.199.559.742	121 %
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0	6.393.229.242	6.393.229.242	100 %
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0	6.393.229.242	6.393.229.242	100 %
6.1.01.01.04.0021	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0	6.393.229.242	6.393.229.242	100 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0	2.365.697.497	2.365.697.497	100 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	0	550.028.480	550.028.480	100 %
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	550.028.480	550.028.480	100 %
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0	1.815.669.017	1.815.669.017	100 %
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0	125.942.220	125.942.220	100 %
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0	1.689.726.797	1.689.726.797	100 %
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	17.468.054.519	22.944.165.404	5.476.110.885	31 %

6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	17.468.054.519	22.944.165.404	5.476.110.885	31 %
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	17.468.054.519	22.944.165.404	5.476.110.885	31 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0	6.964.522.118	6.964.522.118	100 %
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	6.753.052.819	6.753.052.819	100 %
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	6.753.052.819	6.753.052.819	100 %
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0	211.469.299	211.469.299	100 %
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0	211.469.299	211.469.299	100 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>17.468.054.519</b>	<b>38.667.614.261</b>	<b>21.199.559.742</b>	<b>121 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000	500.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000	500.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000	500.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000	500.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>16.968.054.519</b>	<b>38.167.614.261</b>	<b>21.199.559.742</b>	<b>125 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>


  
 Pi. Walikota Langsa
   

  
 SYARIDIN